



PENYALAHGUNAAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI ALAT KAMPANYE (STUDI KASUS DI KECAMATAN X)

Septiya Andriyani¹, Komaruddin², Hatta Azzuhri³

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

septiya09andriyani@gmail.com, komaruddin_uin@radenfatah.ac.id,

hattaazzuhri_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Dari hasil penelitian tersebut sebenarnya Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dapat dijadikan alat kampanye karna, program tersebut sudah terprogram dari pemerintah dan masyarakat yang terpilih untuk mendapatkan manfaat berdasarkan data yang sesuai. Akan tetapi program tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan dengan mengatas namakan program tersebut, untuk mendapat dukungan dan simpati masyarakat bawah, yang Sebenarnya program ini sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya Program Keluarga Harapan (PKH) sering dimanfaatkan oleh kandidat sebagai alat kampanye politik untuk menarik dukungan masyarakat. Masyarakat penerima manfaat cenderung melihat PKH sebagai instrumen politik yang digunakan untuk meningkatkan popularitas kandidat. Politisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menjadi faktor yang meningkatkan peluang kemenangan kandidat dalam pemilu, terutama ketika masyarakat melihat bantuan sosial ini sebagai bukti kepedulian mereka. Dengan mengaitkan PKH dengan pencalonannya, seorang kandidat bisa memperoleh dukungan lebih besar dari penerima manfaat yang merasa memiliki ketergantungan terhadap program tersebut. Hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya elektabilitas dan kemungkinan kemenangan dalam pemilu.

Sejarah Artikel

Submitted: 31 Maret 2025

Accepted: 3 April 2025

Published: 4 April 2025

Kata Kunci

PENDAHULUAN

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007.

PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan (DJA 2015). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat serta mendorong mereka untuk berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang perlu dihadapi, termasuk potensi penyalahgunaan bantuan yang dapat mengganggu tujuan utama program ini.

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan kelompok atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.

Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadi semakin sewenang-wenang dan pada akhirnya berujung pada penyimpangan. Makin besar wewenang itu semakin besar juga



kemungkinan untuk melakukan korupsi (Hafis&Yogiah, 2017). Pelaku utama dalam banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan adalah mereka yang disebut sebagai administrator publika atau pegawai negeri atau aparatur sipil Negara (ASN) (Sudarso, 2015).

Kepala Dinas Sosial Sumatra Selatan Mirwansyah dia menyebut, penerima PKH terbanyak di Sumatra Selatan berada di wilayah Kota Palembang yang mencapai 40.437 Disusul Kabupaten Muara Enim 26.112 KPM, Kabupaten Banyuasin 25.504 KPM, Musi Rawas 23.097 KPM, Ogan Komering Ilir 22.130 KPM, Ogan Ilir 21.817 KPM, dan Ogan Komering Ulu Timur 20.891 KPM dari data tahun 2023 (detikSumbagsel). Di Kecamatan X Terdapat 7 Kelurahan Yaitu Talang Jambe, Kebun Bunga, Sukabangun, Suka Rami, Sukodadi, dan Talang Betutu.

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, di Pasal 1, Angka 35, disebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah “kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang di tunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program dan/atau citra diri peserta pemilu”. Sesuai apa yang disampaikan Irawan, mengungkapkan kampanye adalah “upaya persuasive untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka berseia bergabung dan mendukungnya”(Pemerintah, n.d.).

Kampanye Pemilu sebagai proses tahapan Penyelenggaraan Pemilihan umum berpatokan kepada UU Pemilu. Dengan pengertian “Pemilihan umum merupakan suatu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan. Secara Luber Judil dalam NKRI yang berdasar kan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945”.

Pemilihan umum merupakan prosesi lima tahunan sekali yang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan umum yang ditetapkan oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemungutan suara dilaksanakan secara bersamaan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pemungutan suara yang dilaksanakan di luar negeri dapat dilakukan secara serentak bareng dengan pemilihan umum dalam negeri atau sebelum hari pemungutan suara di dalam negeri dilaksanakan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh tercatat penerima PKH di Kecamatan X sebanyak 2300 KK. Mengapa peneliti memilih Di Kecamatan X, karena di Kecamatan X terdapat isu penyalahgunaan bantuan PKH sebagai alat kampanye politik. Jika program tersebut disalahgunakan oleh aktor politik terutama menjelang pemilihan umum. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam distribusi bantuan sosial agar program PKH dapat berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai penyalahgunaan PKH dalam konteks kampanye di Kecamatan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan memahami isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang konstruktif untuk mencegah penyalahgunaan di masa mendatang dan memastikan bantuan sosial dapat tepat sasaran.

Judul tersebut menjadi menarik karna, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah contoh kebijakan sosial yang dirancang untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, program tersebut diciptakan sebenarnya sangat baik dan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akan tetapi bagaimana jika hal baik tersebut disalahgunakan untuk kepentingan? Tujuan penelitian tersebut lebih untuk mengetahui bagaimana masyarakat memandang program keluarga harapan (PKH) apakah masyarakat melihatnya sebagai alat untuk meningkatkan popularitas atau dukungan politik bagi pihak tertentu, dan bagaimana dampak program ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.



Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan topik sensitif dan relevan dalam konteks sosial. PKH adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu, sehingga ada kepentingan besar untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan dengan benar. Bagaimana bantuan sosial bisa dimanfaatkan untuk keuntungan politik, yang merupakan masalah yang menarik bagi banyak orang, termasuk pembuat kebijakan dan pemilih.

Judul ini penting karena masyarakat harus tahu bahwa bantuan sosial digunakan dengan benar. Hal ini menarik karena bisa membantu menemukan solusi atau tindakan yang bisa diambil untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Dengan mengekspos masalah ini, publik dan pihak berwenang bisa lebih sadar dan mungkin melakukan langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan, serta memperbaiki sistem bantuan sosial.

Pelaksanaan PKH di tingkat lokal tidak menutup kemungkinan menghadapi persoalan, dalam pelaksanaan program tersebut terdapat syarat yang harus sesuai dengan keadaan si penerima bantuan apakah benar warga tersebut layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Salah satu program keluarga harapan ini juga KIP (kartu Indonesia pintar) agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karna kurangnya biaya. Kurangnya pendidikan membuat orang mudah di manfaatkan untuk kepentingan pribadi, bantuan PKH yang seharusnya digunakan untuk membantu keluarga kurang mampu, dapat disalahgunakan untuk kepentingan- kepentingan kelompok tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dimana hasil akhir dari penelitian ini dijabarkan dengan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. (Nazir 2006)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul “Penyalahgunaan Bantuan Program Keluarga Harapan Sebagai Alat Kampanye Studi Kasus Di Kecamatan X” ini bertujuan untuk menggali penyalahgunaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang memanfaatkannya sebagai alat untuk kepentingan kampanye politik di wilayah Kecamatan X. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif.

Pendekatan kualitatif-deskriptif dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan pemahaman dari pengalaman individu, kelompok, atau komunitas yang terlibat dalam penyalahgunaan bantuan sosial. Fokusnya adalah pada persepsi, penilaian, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks tertentu, yang dalam hal ini terkait dengan penggunaan bantuan sosial untuk tujuan politik.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana proses penyalahgunaan bantuan sosial berlangsung, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan kegiatan kampanye politik di daerah tersebut. Studi ini melibatkan masyarakat penerima manfaat, pendamping PKH, ketua kelompok PKH, dan pegawai kantor camat Sukarami Palembang. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang



mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan bantuan sosial, seperti hubungan antara masyarakat dan pihak-pihak yang menyelenggarakan kampanye.

Peneliti menggunakan teori Mobilisasi dan Teori Rasional Choice. Dengan memanfaatkan kedua teori ini, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana aspek sosial-politik berinteraksi dalam konteks bantuan sosial. Teori mobilisasi membantu memahami dinamika sosial di lapangan, sementara teori rasional choice memberikan wawasan tentang bagaimana individu membuat keputusan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi dalam konteks politik.

A. Penggunaan PKH sebagai Alat Kampanye Politik (Analisis Mobilisasi Sosial dan Pilihan Rasional)

Hasil penelitian ini membahas bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) digunakan dalam kampanye politik dengan melihatnya dari dua pendekatan, yaitu mobilisasi sosial dan teori pilihan rasional.

1. Strategi Kandidat dalam Memanfaatkan PKH

PKH adalah bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam praktik politik, program ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai alat kampanye. Misalnya, ada kandidat yang mengklaim bahwa PKH merupakan kebijakan mereka atau memberikan janji akan meningkatkan nominal bantuan jika terpilih. Bahkan, ada juga upaya memberi kesan bahwa PKH bisa dihentikan jika masyarakat tidak memilih kandidat tertentu.

Dari sudut pandang mobilisasi sosial, PKH dapat menjadi sarana untuk menggerakkan masyarakat agar mendukung kandidat tertentu. Ini bisa terjadi melalui pendamping PKH atau komunitas penerima manfaat yang diarahkan untuk memilih pihak yang dianggap berjasa dalam program tersebut. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial juga bisa muncul, di mana penerima PKH merasa terdorong untuk memilih kandidat tertentu karena pengaruh dari lingkungan sekitar.

Sementara itu, dalam teori pilihan rasional, masyarakat memilih berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian. Bagi penerima PKH, faktor ekonomi jangka pendek sering menjadi pertimbangan utama. Mereka cenderung memilih kandidat yang menjamin kelanjutan atau peningkatan bantuan sosial dibanding mempertimbangkan visi-misi atau kebijakan lain yang lebih luas. Dengan kata lain, keputusan politik mereka lebih didorong oleh kepentingan pribadi dalam jangka pendek daripada faktor ideologis atau kebijakan jangka panjang.

Wawancara dengan A warga kelurahan x penerima PKH

“Ibu A mengatakan bahwa memang ada 2 anggota caleg DPRD kota Palembang dan caleg DPD RI pada saat mendekati pemilu bulan februari 2024 yang meminta dukungan dari kami para penerima manfaat untuk memberikan suara, mereka melalui pendamping PKH mengumpulkan kami di salah satu rumah warga penerima PKH dan diajak kumpul dan makan-makan di salah satu restoran makanan cepat saji disitu 2 caleg ini bergabung meminta dukungan dengan janji-janji akan melanjutkan PKH ini dan ibu-ibu yang sudah terpilih akan tetap menerima PKH itu selama mereka tetap menjabat, tetapi jika mereka tidak terpilih mereka tidak mengetahui bagaimana nasib program tersebut. Caleg tersebut memberikan souvenir, stiker caleg, dan amplop uang sebesar 100.000. Tentu kami memilih mereka pada saat pemilu, karna harapan kami



program tersebut tetap berlanjut, kami khawatir jika nama kami dicabut dari PKH". (Wawancara bersama ibu A kelurahan x, februari 2, 2025)

Berdasarkan wawancara dengan ibu A, Dari wawancara dengan Ibu A, dapat disimpulkan bahwa PKH telah dimanfaatkan sebagai alat kampanye politik oleh beberapa calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2024. Para caleg tersebut berusaha mendapatkan dukungan dari penerima manfaat PKH dengan cara mengadakan pertemuan melalui pendamping PKH, memberikan jamuan makan, serta menyampaikan janji politik terkait kelanjutan program PKH. Mereka menggunakan strategi tekanan psikologis, dengan menyampaikan bahwa keberlanjutan PKH bergantung pada kemenangan mereka, sehingga penerima manfaat merasa terpaksa memilih mereka karena takut kehilangan bantuan. Kesimpulannya, wawancara ini menunjukkan bahwa PKH bukan hanya digunakan sebagai insentif elektoral, tetapi juga menjadi alat mobilisasi politik yang memengaruhi pilihan pemilih. Praktik ini berpotensi melanggar etika dan aturan pemilu, serta mencederai asas keadilan dalam demokrasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam konteks kampanye politik, PKH sering digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kepedulian kandidat terhadap masyarakat miskin. Kandidat politik memanfaatkan PKH dengan cara:

- a) Meningkatkan visibilitas kampanye, kandidat sering kali menggunakan PKH sebagai bagian dari strategi untuk menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Dengan memperkenalkan atau menyatakan bahwa mereka akan memperjuangkan keberlanjutan PKH, mereka berusaha memenangkan hati pemilih yang mengandalkan program tersebut.
- b) Membangun hubungan dengan konstituen, PKH menjadi salah satu cara bagi kandidat untuk menjalin hubungan dengan pemilih dari kalangan keluarga miskin dan penerima bantuan sosial. Dalam beberapa kasus, kandidat bahkan menyelenggarakan acara yang berfokus pada distribusi bantuan PKH untuk menciptakan kedekatan dengan masyarakat.
- c) Meningkatkan citra kandidat, Penggunaan PKH dalam kampanye politik juga dapat meningkatkan citra kandidat sebagai figur yang memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui strategi ini, kandidat berupaya menggambarkan diri mereka sebagai agen perubahan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial.

Salah satu potensi penyalahgunaan PKH oleh kandidat pemilu adalah penggunaan program tersebut sebagai alat untuk memperoleh suara. Beberapa kandidat dapat memanfaatkan posisi mereka untuk mempengaruhi penyaluran bantuan sosial, dengan harapan bahwa keluarga penerima manfaat akan merasa terikat atau terima kasih kepada mereka. Hal ini dapat membuat para pemilih merasa bahwa mereka harus mendukung kandidat tertentu karena bantuan sosial yang mereka terima.

Peneliti melakukan tracking tentang berita penyalahgunaan PKH sebagai alat kampanye di tahun 2019



(Sumber <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/02/15/>)

Isi unggahan :

”Ada pendamping yang mengintimidasi para penerima untuk memilih caleg tertentu. Ada yang membagikan alat peraga kampanye dan memfasilitasi pertemuan terbatas caleg,” ungkap Gufroni dalam Diskusi Bansos dan Pemilu yang diadakan oleh MAK di Jakarta, Jumat (15/2/2019). Gufroni mengungkapkan, pendamping PKH tersebut memiliki basis data yang bisa dimanfaatkan oleh para caleg. Sejumlah kasus terbukti ditemukan di sejumlah daerah, misalnya di Tangerang, Makasar, Sikka, dan Purworejo. ”Di Tangerang, penyaluran bansos diselingi oleh pembagian stiker dari caleg tertentu. Itu sudah dilaporkan oleh pihak Bawaslu,” ujar Gufroni.

Berdasarkan isi berita tersebut, Dalam diskusi yang diadakan oleh MAK di Jakarta, disebutkan bahwa ada pendamping PKH yang tidak netral dan justru mengarahkan penerima bantuan sosial (bansos) untuk memilih calon legislatif (caleg) tertentu. Praktik ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti intimidasi terhadap penerima PKH, pembagian alat peraga kampanye (APK), hingga memfasilitasi pertemuan antara caleg dan penerima bansos.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pendamping PKH memiliki peran strategis dalam politik elektoral, karena mereka mengakses langsung data penerima bantuan dan dapat mempengaruhi pilihan politik mereka. Beberapa kasus nyata juga ditemukan di daerah seperti Tangerang, Makassar, Sikka, dan Purworejo. Contohnya, di Tangerang, penyalur bansos diselingi dengan pembagian stiker caleg tertentu, yang bahkan sudah dilaporkan ke Bawaslu.

Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa PKH yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan sosial malah dijadikan alat kampanye politik oleh pihak tertentu. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam implementasi kebijakan bansos yang seharusnya bersifat netral dan tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu ketua kelompok PKH di Kecamatan X ibu B mengatakan:

“Pernah saat itu kami ketua kelompok ini didata oleh orang kelurahan mereka bilang, kami ketua kelompok PKH tersebut akan mendapatkan hadiah dari kementerian mereka menanyakan berapa watt listrik dan meminta NIK kami, sekitar 2 minggu setelah pendataan tersebut saya di panggil disuruh ikut mengambil hibah dari Kementerian Energi dan Sumber



Daya Mineral tersebut, saya kurang yakin karna orang tersebut bukan dari kelurahan atau pendamping PKH tetapi karna ada beberapa tetangga yang saya kenal jadi saya ikut ketempat tersebut. Kami dikumpulkan disalah satu rumah RT di Kecamatan X, terdapat orang Bawaslu yang ikut membagikan Magic warmer tersebut. Sebelum membagikan magic datang salah satu caleg yang mengatas namakan bahwa bantuan tersebut adalah dari beliau, dia mengatakan bahwa jika dia terpilih maka program tersebut akan terus berlanjut dan bisa jadi nominalnya akan bertambah. Setelah pembagian itu saya heran karna kebanyakan orang saya tau mereka itu bukan penerima PKH bahkan pendamping PKH pun tidak mengetahui pembagian tersebut sudah dilaksanakan karna ini adalah dana hibah dari kementerian untuk ketua kelompok PKH. Setelah pembagian tersebut kami dihimbau untuk tidak memberitahu dengan siapapun bahwa kami sudah mendapatkan magic tersebut” (wawancara bersama ibu ketua kelompok februari 2, 2025)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu ketua kelompok PKH dapat disimpulkan bahwa bantuan tersebut disalahgunakan oleh salah satu kandidat untuk berkampanye. Tentunya kandidat tersebut memiliki power yang kuat jika bisa mengambil barang tersebut dan membagikannya dengan masyarakat yang bahkan bukan penerima PKH. Ibu yang saya wawancarai ini sudah mencurigai adanya kecurangan oleh kandidat tersebut, bahkan temannya yang sesama ketua kelompok tidak mendapatkan hadiah tersebut padahal mereka sama-sama didata oleh kelurahan. Akan tetapi ibu ini tidak memilih kandidat tersebut ketika pemilu dilaksanakan, karna ibu tersebut memahami bawasannya memilih itu berdasar hati nurani bukan dari paksaan atau tekanan dari pihak manapun.



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2025, Februari 2)

2. Persepsi Masyarakat Penerima PKH terhadap Penggunaan PKH dalam Kampanye

PKH merupakan program bantuan sosial yang berfokus pada keluarga miskin atau rentan. Oleh karena itu, dengan memberikan bantuan PKH dalam jumlah yang signifikan atau bahkan menjanjikan kelanjutan dari program ini jika terpilih, kandidat politik dapat menciptakan citra mereka sebagai sosok yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya mereka yang terpinggirkan secara ekonomi. Dalam hal ini, kandidat dapat memosisikan diri mereka sebagai pembela hak-hak ekonomi rakyat, yang memiliki kepedulian terhadap pengentasan kemiskinan.

Dengan melakukan hal ini, kandidat tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menciptakan hubungan emosional dengan kelompok masyarakat tertentu. Mereka dapat membangun narasi bahwa tanpa dukungan mereka, bantuan sosial seperti PKH



mungkin tidak akan diteruskan, atau bahkan terhenti sama sekali. Hal ini memperkuat hubungan timbal balik antara kandidat dan pemilih dari kalangan miskin, yang mungkin merasa bahwa hanya kandidat tersebut yang dapat memperjuangkan kelanjutan program sosial tersebut.

Seperti lanjutan wawancara dengan ibu A beliau menambahkan :

“Salah satu caleg yang mengumpulkan kami di restoran itu bilang kalau pada saat 2019 beliau terpilih dan sudah memenuhi janjinya dengan tetap mempertahankan program tersebut. Beliau mengharapkan di 2024 kemarin jika beliau terpilih kembali maka program tersebut akan berjalan sebagai mana mestinya akan tetapi jika beliau tidak terpilih beliau tidak mengetahui bagaimana keberlanjutan program tersebut.” (Wawancara bersama ibu A kelurahan x, februari 2, 2025)

Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa, kandidat yang menggunakan program tersebut menunjukkan bagaimana politisi dapat menggunakan strategi mobilisasi sosial untuk mempengaruhi pemilih. Dengan adanya janji bahwa program tetap berjalan jika caleg terpilih, masyarakat cenderung memilih berdasarkan manfaat yang dijanjikan, meskipun dalam sistem yang ideal, keberlanjutan program seharusnya tidak bergantung pada individu yang berkuasa. Karna program tersebut adalah **program bantuan sosial resmi dari pemerintah** yang didasarkan pada kebijakan negara, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

B. Pandangan Masyarakat terhadap PKH sebagai Instrumen Politik dan Pengaruhnya terhadap Popularitas Kandidat

Masyarakat memiliki pemahaman yang beragam mengenai tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagian besar menyadari bahwa PKH merupakan program bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Mereka memahami bahwa bantuan ini bersyarat, di mana penerima manfaat harus memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.

Namun, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang PKH. Ada yang menganggapnya sebagai bantuan tetap tanpa syarat, sementara yang lain melihatnya sebagai hak yang diberikan tanpa kewajiban tertentu. Selain itu, masih terdapat anggapan keliru bahwa program ini diberikan berdasarkan faktor di luar kondisi ekonomi, seperti kedekatan dengan aparat desa atau afiliasi politik tertentu. Sumber informasi yang diterima masyarakat juga memengaruhi cara mereka memahami PKH. Mereka yang mendapatkan informasi dari media resmi atau pendamping program umumnya memiliki pemahaman yang lebih akurat. Sebaliknya, mereka yang hanya mendengar informasi dari orang lain tanpa sumber yang jelas mungkin memiliki persepsi yang kurang tepat. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif dan transparansi dalam pelaksanaan program menjadi faktor penting dalam memastikan masyarakat memahami tujuan utama PKH dengan baik.

Menurut ibu Di warga kelurahan x, salah satu penerima manfaat sejak 2018 mengatakan:

“Program tersebut sangat membantu dan lebih banyak manfaatnya, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan program tersebut ketika mendekati pemilu. Mereka mengatas namakan dari PKH untuk meminta dukungan, tetapi dana yang diberikan oleh pemerintah tidak pernah dikurangi, dan untuk didaerah kami ini penerima PKH tepat sasaran.” (wawancara bersama ibu D februari 23 2025)



Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan dua sisi dari Program Keluarga Harapan (PKH). Di satu sisi, masyarakat merasakan manfaat besar dari program ini karena membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dana yang diberikan oleh pemerintah tetap utuh dan tidak mengalami pengurangan, sehingga bantuan dapat diterima sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bahkan, di daerah tersebut, penerima PKH dianggap sudah tepat sasaran, yang berarti bahwa mereka yang benar-benar membutuhkan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan.

Namun, di sisi lain, terdapat praktik yang kurang etis yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, terutama menjelang pemilu. Mereka memanfaatkan program PKH sebagai alat politik untuk meminta dukungan dari masyarakat dengan mengatasnamakan program tersebut. Meskipun dana PKH tidak berkurang, tindakan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat, seolah-olah program tersebut memiliki kaitan langsung dengan kepentingan politik tertentu. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan program dan menimbulkan persepsi bahwa bantuan sosial digunakan untuk kepentingan politik. Dengan demikian, meskipun PKH tetap berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, perlu ada pengawasan lebih ketat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, terutama selama masa pemilu.

Peneliti juga mewawancarai ibu-ibu penerima PKH di Kecamatan X, kelurahan A mereka mengatakan:

“Bagi kami, para penerima PKH yang memiliki sedikit pemahaman tentang politik, tidak mudah tergiur oleh janji-janji tertentu. Namun, jika ada pihak yang memberi sesuatu, kami menerimanya. Di daerah kami, pendamping PKH aktif mengadakan sosialisasi melalui pertemuan kelompok. Kami selalu diimbau untuk tidak mudah percaya kepada tim sukses atau pihak mana pun yang mengatasnamakan PKH, kecuali informasi tersebut berasal langsung dari pendamping resmi. Terkait keberlanjutan atau tidaknya manfaat PKH, kami memahami bahwa hal ini harus melalui proses pendataan yang tepat. Dengan demikian, tidak sembarang orang dapat mengajukan atau mencabut kepesertaan kami dari program PKH tersebut.” (Wawancara dengan ibu-ibu Kecamatan X, kelurahan A, Februari 23, 2025)

Wawancara ini menunjukkan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki pemahaman tentang politik tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji dari pihak tertentu, terutama dalam konteks kampanye. Mereka tetap menerima pemberian dari tim sukses (timses) atau pihak lain, tetapi tidak serta-merta percaya dengan klaim yang mengatasnamakan PKH. Pernyataan ini juga menyoroti peran aktif pendamping PKH dalam memberikan sosialisasi kepada penerima manfaat. Melalui pertemuan kelompok, mereka diberikan pemahaman bahwa informasi resmi terkait PKH hanya boleh diterima dari pendamping yang bertugas, bukan dari pihak lain yang berusaha memanfaatkan program ini untuk kepentingan politik.

Selain itu, wawancara ini menegaskan bahwa keberlanjutan PKH tidak bergantung pada individu atau kelompok politik tertentu, melainkan melalui proses pendataan yang ketat dan sistematis. Penerima manfaat menyadari bahwa masuk atau keluarnya seseorang dari PKH harus melalui prosedur resmi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, bukan keputusan sepihak dari pihak yang berkepentingan dalam pemilu.

Secara keseluruhan, wawancara ini mencerminkan bahwa sebagian masyarakat sudah memiliki kesadaran politik dan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme PKH. Mereka



tidak mudah dipengaruhi oleh manipulasi politik dan menyadari bahwa program ini merupakan hak sosial yang dijalankan berdasarkan aturan yang jelas.

Ibu-ibu yang lain juga menanggapi uraian diatas, dia mengatakan:

“Bagi kami yang belum mendapatkan PKH ini tentunya kami mudah tergiur, karna pernah kami dimintai data katanya untuk didaftarkan mendapatkan PKH, setelah itu kami diberikan souvenir dan stiker caleg tentunya kami memilih kandidat tersebut, dengan harapan akan mendapatkan sedikit bantuan untuk anak sekolah, dan berobat gratis akan tetapi sampai saat ini belum ada kabar lagi dan orang tersebut menang dipemilu kemarin.”
(Wawancara dengan ibu-ibu bukan penerima manfaat, Februari 23, 2025)

Berdasarkan penjelasan diatas bagi keluarga yang belum mendapatkan manfaat sebagai orang yang benar-benar membutuhkan sepertinya mereka sangat berharap dengan program tersebut. Bahkan mereka memilih kandidat yang menjanjikan mereka untuk mendapatkan manfaat tersebut, dan kandidat yang melakukan ini menang dalam pemilu.

Setelah peneliti melakukan berbagai wawancara ini hal ini dapat disimpulkan bawasannya hanya sebagian orang yang tidak takut memilih kandidat yang menggunakan PKH sebagai alat kampanye. Kebanyakan bagi masyarakat yang membutuhkan mereka memilih kandidat yang menggunakan Program tersebut mereka mudah takut jika benar PKHnya akan dicabut, ada juga yang takut tidak mendapat manfaat tersebut. Bagi orang yang benar-benar membutuhkan mereka sangat berharap ada orang yang bersimpati dengan keadaan mereka, dan memperjuangkan hak mereka.

C. Pengaruh Politisasi PKH terhadap Elektabilitas Kandidat dalam Perspektif Pemilih Rasional

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan bersyarat. Namun, dalam konteks politik, program ini sering kali dikaitkan dengan upaya peningkatan elektabilitas kandidat tertentu, terutama menjelang pemilu. Politisasi PKH terjadi ketika program ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat penerima manfaat.

Hasil wawancara dengan salah satu warga yang bukan penerima manfaat

“Waktu itu sekitar bulan November 1 minggu sebelum pemilu siang hari rumah saya diketok oleh tim salah satu timses calon walikota, mereka menanyakan apakah ibu sudah mendapatkan PKH? Saya jawab belum, nah sini KTP sama KK ibu kita bantu daftarkan kata mereka. Mereka juga menambahkan jika kandidat tersebut terpilih ibu tersebut akan mejadi penerima manfaat juga mereka juga memberikan souvenir seperti sajadah kecil, kalender, dan stiker. Tentu pada saat pemilu saya memilih beliau karna saya sangat berharap menerima PKH tersebut, tetapi sampai saat ini saya tidak mendapatkan kabar diterima atau tidaknya. (wawancara bersama ibu bukan penerima manfaat februari 25, 2025)

Berdasarkan Dampak dari kejadian ini terlihat jelas dalam keputusan pemilih. Warga yang diwawancarai mengaku memilih kandidat tersebut karena adanya harapan untuk menjadi penerima manfaat PKH. Hal ini menunjukkan bahwa strategi tersebut cukup efektif dalam membangun harapan di kalangan masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan sosial. Namun, setelah pemilu usai, warga tersebut tidak mendapatkan kepastian mengenai status penerimaannya dalam PKH, yang menimbulkan kekecewaan dan menunjukkan bahwa janji yang diberikan belum tentu terealisasi.



Fenomena seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk politisasi bantuan sosial, di mana program pemerintah yang seharusnya bersifat netral digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik. Dalam konteks demokrasi, praktik semacam ini dapat memengaruhi integritas pemilu karena pemilih tidak lagi memilih berdasarkan program dan visi kandidat, tetapi karena janji pemberian bantuan sosial. Selain itu, hal ini juga dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses seleksi penerima PKH jika janji tersebut tidak terealisasi.

Politisasi PKH dapat berdampak pada elektabilitas kandidat dalam beberapa cara. Di satu sisi, kandidat yang dikaitkan dengan program ini dapat memperoleh keuntungan dukungan, karena masyarakat penerima PKH merasa memiliki keterikatan dengan mereka. Hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa keberlanjutan bantuan sosial bergantung pada terpilihnya kandidat tertentu, sehingga meningkatkan loyalitas pemilih. Selain itu, kandidat yang berhasil mengkomunikasikan dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terselenggaranya PKH dapat memperoleh dukungan lebih besar dari masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Di sisi lain, politisasi PKH juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi elektabilitas kandidat. Jika masyarakat menyadari bahwa program ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik, maka dapat muncul sentimen negatif terhadap kandidat yang dianggap menggunakan bantuan sosial sebagai alat kampanye. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan pemilih terhadap kandidat tersebut, terutama jika terdapat indikasi bahwa program tersebut digunakan sebagai bentuk tekanan politik atau janji yang tidak realistis. Selain itu, jika terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran PKH, seperti pemberian bantuan hanya kepada kelompok tertentu yang mendukung kandidat tertentu, maka hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan kandidat yang bersangkutan.

Dengan demikian, dampak politisasi PKH terhadap elektabilitas kandidat sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menafsirkan keterkaitan antara program ini dengan kontestasi politik. Jika masyarakat melihat PKH sebagai kebijakan yang murni untuk kesejahteraan sosial, maka dampak politiknya akan minimal. Namun, jika program ini dianggap sebagai alat kampanye, maka dapat menjadi faktor yang memengaruhi preferensi pemilih, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk menjaga netralitas program ini agar tidak digunakan sebagai alat politik dan tetap berfokus pada tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Pengawasan dan Transparansi Program PKH

Untuk menghindari penyalahgunaan program PKH dalam Pemilu 2024, penting bagi pemerintah untuk memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap distribusi bantuan sosial ini. Pengawasan ini bertujuan agar penerima manfaat tidak terpengaruh oleh janji politik yang tidak realistis dan agar program tetap berfungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup tanpa ada kaitannya dengan kepentingan politik. Selain itu, transparansi dalam proses penyaluran PKH juga penting untuk mencegah praktik politik praktis yang dapat merugikan masyarakat. Data penerima bantuan harus dapat diakses publik, dan sistem yang digunakan untuk pendataan serta penyaluran bantuan harus transparan dan akuntabel.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama ibu Staff kecamatan X selaku Kasi Kesos kecamatan menyatakan :



“Bahwa jika dari kelurahan dan kecamatan hanya ikut membantu dan menyediakan tempat jadi mereka tidak mengawasi, karna tugas tersebut dilakukan oleh pendamping PKH dan TKSK.” (wawancara bersama ibu Staff kecamatan X, Februari 11, 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pendamping PKH di salah satu Kecamatan X dia mengatakan :

“Untuk memahami PKH ini kita harus mengetahui dulu bagaimana prosedurnya, jadi kalo untuk pembagian uang bantuan tersebut, masyarakat diberikan ATM dan buku tabungan langsung dari pemerintah yang dibagikan melalui kantor lurah, ATM tersebut memiliki pin yang hanya boleh diketahui oleh penerima manfaat itu sendiri. Jadi jika uangnya sudah masuk biasanya kami pendamping ini memberitahukan kepada ketua kelompok untuk mengabari yang lain juga untuk memberitahukan jika uangnya sudah masuk. Jadi kalo untuk penyalahgunaan dari dana bantuan itu tidak mungkin bisa dilakukan. Untuk penyalahgunaan dibidang kepentingan individu atau kelompok ini tidak dapat terukur, karna itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu karna mengatasnamakan PKH. Setau saya PKH ini juga pernah disalahgunakan oleh LSM, Pilar-pilar sosial, bahkan baru-baru ini ada oprator PKH sendiri yang melakukan penginputan data dengan cara mengambil pungli dari orang-orang yang ingin didaftarkan untuk mendapatkan manfaat tersebut.” (Wawancara dengan pendamping PKH, Maret 6, 2025)

Kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki mekanisme pencairan dana yang telah dirancang untuk mencegah penyalahgunaan. Sehingga kecil kemungkinan dana bantuan dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Selain itu, informasi terkait pencairan dana diberikan oleh pendamping PKH kepada ketua kelompok untuk kemudian disampaikan kepada seluruh penerima manfaat, sehingga transparansi dalam proses penyaluran dapat terjaga.

Namun, meskipun mekanisme pencairan dana telah diatur dengan sistem yang aman, masih terdapat potensi penyalahgunaan dalam aspek lain, terutama dalam proses pendataan dan pendaftaran penerima manfaat.

Pendamping PKH tersebut juga menambahkan ia mengatakan:

“Untuk sosialisai untuk mendapatkan PKH ini dilakukan di tiap pertemuan kelompok yang dilakukan oleh pendamping PKH dan dilakukan ditiap RT bagaimana proses pendataannya dan sebagainya. Jalan atau tidaknya sosialisai ini tergantung dengan bagaimana pendamping PKH menjalankannya. Masyarakat dihimbau untuk tidak memberi tahukan pin ATM kepada siapapun, dan untuk keluarga yang belum mendapatkan manfaat mungkin masih ada keluarga lain yang benar-benar layak untuk dapat PKH ini. Untuk proses pendataan di daerah yang saya pegang itu biasanya dilakukan sekala berkala agar tepat sasaran. (Wawancara dengan pendamping PKH, Maret 6, 2025)

Kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara berkala melalui pertemuan kelompok serta di tingkat RT oleh pendamping PKH. Efektivitas sosialisai ini bergantung pada sejauh mana pendamping menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi terkait mekanisme pendataan dan pelaksanaan program. Selain itu, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan PIN ATM guna mencegah



potensi penyalahgunaan dana bantuan. Bagi keluarga yang belum menerima manfaat, hal ini disebabkan oleh prioritas pemberian bantuan kepada keluarga yang dinilai lebih membutuhkan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.

Dengan demikian, keberlanjutan dan efektivitas PKH sangat dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi, kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan program, serta mekanisme pendataan yang dilakukan secara objektif dan terstruktur agar bantuan dapat diterima oleh kelompok yang benar-benar memenuhi kriteria penerima manfaat.



Sumber pendamping PKH Kelurahan X Kecamatan X

2. Peran Media dan Kesadaran Masyarakat

Media massa juga memegang peranan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas kebijakan dan visi-misi kandidat, bukan karena bantuan sosial yang diterima. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam pendidikan politik. Dengan jangkauan yang luas dan kemampuan untuk membentuk opini publik, media massa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang tentang para kandidat dan program-program mereka.

Media massa dapat memainkan peran kunci dalam hal ini dengan:

1. Menyelenggarakan Debat Kandidat: Debat kandidat yang disiarkan secara luas memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membandingkan visi, misi, dan program-program para kandidat secara langsung.
2. Melakukan Analisis Kebijakan: Media massa dapat menghadirkan para ahli untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh para kandidat, sehingga masyarakat dapat memahami dampak potensial dari kebijakan-kebijakan tersebut.
3. Memberikan Informasi yang Mendalam: Media massa dapat menyajikan laporan-laporan investigasi dan artikel-artikel yang mendalam tentang rekam jejak dan kredibilitas para kandidat.



Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa PKH adalah hak mereka sebagai warga negara, yang diberikan tanpa mengikatkan diri pada dukungan politik tertentu. Salah satu tantangan dalam pemilihan umum ialah kecenderungan pemilih untuk terpengaruh oleh bantuan sosial yang diberikan oleh kandidat.

Media massa dapat membantu masyarakat memahami hal ini dengan:

1. Memberikan informasi yang jelas tentang kriteria dan prosedur penerimaan PKH.
2. Melaporkan secara kritis tentang potensi penyalahgunaan PKH untuk kepentingan politik.
3. Mendorong masyarakat untuk melaporkan jika mereka merasa dipaksa untuk memberikan dukungan politik sebagai syarat penerimaan PKH.

Media massa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini dengan mendorong literasi media, sehingga masyarakat dapat membedakan antara informasi yang benar dan yang salah, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, media massa tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk kesadaran politik masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi atau pembicaraan, dapat diajukan beberapa kesimpulan berikut :

1. Dari hasil penelitian tersebut sebenarnya Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dapat dijadikan alat kampanye karna, program tersebut sudah terprogram dari pemerintah dan masyarakat yang terpilih untuk mendapatkan manfaat berdasarkan data yang sesuai. Akan tetapi program tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan dengan mengatas namakan program tersebut, untuk mendapat dukungan dan simpati masyarakat bawah, yang Sebenarnya program ini sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya
2. Program Keluarga Harapan (PKH) sering dimanfaatkan oleh kandidat sebagai alat kampanye politik untuk menarik dukungan masyarakat. Masyarakat penerima manfaat cenderung melihat PKH sebagai instrumen politik yang digunakan untuk meningkatkan popularitas kandidat.
3. Politisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menjadi faktor yang meningkatkan peluang kemenangan kandidat dalam pemilu, terutama ketika masyarakat melihat bantuan sosial ini sebagai bukti kepedulian mereka. Dengan mengaitkan PKH dengan pencalonannya, seorang kandidat bisa memperoleh dukungan lebih besar dari penerima manfaat yang merasa memiliki ketergantungan terhadap program tersebut. Hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya elektabilitas dan kemungkinan kemenangan dalam pemilu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Pemerintah dan lembaga terkait harus menegaskan bahwa PKH adalah program bantuan sosial yang tidak terkait dengan kepentingan politik tertentu. Transparansi dalam penyaluran



- bantuan perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa program ini bersifat berkelanjutan, terlepas dari siapa yang menjabat.
2. Pemerintah sebaiknya mengembangkan program yang tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan begitu, masyarakat tidak bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang dan lebih mandiri secara ekonomi.
 3. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa PKH adalah hak mereka sebagai warga negara, bukan hadiah dari kandidat tertentu. Kampanye literasi politik harus digencarkan agar masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan visi, program kerja, dan integritas, bukan hanya karena janji keberlanjutan bantuan sosial.
 4. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap elektabilitas kandidat serta implikasinya terhadap demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola penggunaan PKH dalam strategi politik serta dampak jangka panjangnya terhadap kepercayaan publik.
 5. Survei sangat penting dalam penelitian ini karena dapat memberikan data yang objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan dampaknya terhadap elektabilitas kandidat. Dengan melakukan survei, dapat diperoleh gambaran yang lebih akurat tentang sejauh mana masyarakat mengaitkan PKH dengan pilihan politik mereka serta bagaimana program ini memengaruhi keputusan pemilih dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

“ABUSE OF POWER.” n.d.

DJA. 2015. “Program Keluarga Harapan,” 1–13.

Hapsari, Dwi Retno. 2016. “K Omunikas I.” *JIPSI - Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM* 01 (01): 25–36.

“Kecamatan-Sukarami-Dalam-Angka-2023 (1).” n.d.

Kornblum, William, Kimball Young, Anthony Giddens, and Paul B Horton. n.d. “Pengertian Mobilitas Menurut Para Ahli.”

Pemerintah, Fasilitas. n.d. Tindak Pidana Kampanye Pemilu.

Ramadhan, Choky R. 2023. “Teori Pilihan Rasional Untuk Memahami Koruptor Di Indonesia.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 9 (2): 171–82. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.949>.

Syafrida Hafni Sahir. 2022. Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022. Edited by M.Si Dr. Ir. Try Koryati. PENERBIT KBM INDONESIA.